

IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DI KABUPATEN BOJONEGORO

Rahmatullilahi Ta'ala¹, Ahmad Suprastiyono², Musta'ana³
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro
Email: tiyopras207@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Elderly Family Development (BKL) program in Bojonegoro Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This research focuses on the Implementation of the Elderly Family Development Program (BKL) in Bojonegoro Regency using three implementation indicators proposed by Charles O Jones, namely organization, interpretation, and implementation. The method used is a qualitative approach. Data and information obtained by means of interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate, in the organizational aspect in terms of implementing human resources in carrying out activities, they are qualified, but in terms of reporting they are neglected because some senior PKB/PLKB do not master IT and there are village level poktan cadres who hold concurrent positions. In terms of budget there is no problem, it's just that the facilities that support the implementation of the program are not sufficient. Implementers carry out BKL activities, join Posyandu for the elderly or other activities.

Keywords: Implementation, Elderly Family Development.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan tiga indikator implementasi yang dikemukakan oleh Charles O Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan. Adapun metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, pada aspek organisasi dalam hal sumber daya manusia pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sudah mumpuni, tetapi dalam hal pelaporan terlengkalai karena beberapa PKB/PLKB yang usia senior kurang menguasai IT serta adanya kader poktan tingkat desa yang rangkap jabatan. Dari segi anggaran tidak ada masalah, hanya saja untuk fasilitas yang mendukung pelaksanaan program kurang tercukupi. Implementator melaksanakan kegiatan BKL gabung dengan posyandu lansia atau kegiatan lainnya.

Keywords : Implementasi, Bina Keluarga Lansia.

PENDAHULUAN

Lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas (Undang-Undang No.13 Tahun 1998). Lansia di Indonesia mengalami peningkatan jumlah dan proporsi cukup pesat. Pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai sekitar 63,31 juta penduduk lansia atau hampir mencapai 20 persen populasi. Pada tahun 2045 diperkirakan satu dari lima penduduk Indonesia adalah penduduk lansia. Hasil proyeksi penduduk yang dilansir oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dan United Nations Population Fund (UNFPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2045, penduduk lansia mencapai sekitar 19,8% dari total penduduk sebesar 318,9 juta jiwa (Sari Seftiani, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hasil sensus penduduk tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas atau lansia. Dari hasil sensus penduduk mulai tahun 1970 sampai tahun 2020 selalu mengalami kenaikan, yaitu dari hasil sensus penduduk pertama 2,49 persen dan pada hasil sensus penduduk tahun 2020 menjadi 5,95 persen.

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan lanjut usia ini cukup besar, yang diawali pada tahun 1996 dengan ditetapkannya tanggal 29 Mei yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Lanjut Usia. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan hukum keberadaan para lanjut usia. Di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia

ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia (Jamilah dkk, 2015).

BKKBN merupakan salah satu instansi yang memberikan suatu wadah bagi lanjut usia dalam bentuk penyuluhan dan pembinaan yang berintegrasi dengan Kelompok Kerja (POKJA). Salah satu program yang dikembangkan saat ini adalah Bina Keluarga Lansia (BKL). Bina Keluarga Lansia atau BKL ialah suatu wadah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang mempunyai lansia untuk mengetahui, memahami, serta mampu membina kondisi ataupun permasalahan lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang sehat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat (BKKBN, 2012).

Layanan Bina Keluarga Lansia (BKL) ini diperuntukkan bagi keluarga yang mempunyai anggota lansia dan keluarga yang seluruh anggotanya lansia. Secara tidak langsung juga diperuntukkan untuk perorangan, yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, dan berbagai bidang disiplin ilmu yang taerkait (dokter, bidan, perawat, psikolog). Mereka dibina dan di beri penyuluhan agar bisa melihat keadaan lansia disekitarnya sehingga mampu merawat dan menciptakan lansia yang produktif sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup lansianya (Jamilah dkk, 2016). Bina Keluarga Lansia menanamkan kepada keluarga lanjut usia supaya senantiasa memperhatikan kehidupan

lanjut usia. BKL sendiri mempunyai banyak kegiatan, antara lain yaitu penyuluhan, senam lansia, pemeriksaan kesehatan, kunjungan rumah. Dan pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL) secara khusus telah diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia.

Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) saat ini tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sejenis seperti posyandu lansia, pembinaan orang jompo, perkumpulan olahraga lansia, dan sebagainya, yang lebih menyedihkan petugas BKKBN malah ikut-ikutan pada kegiatan tersebut sehingga kegiatan BKL-nya tidak muncul. Metode dari aktivitas organisasi, pelaksana dalam mengimplementasikan program BKL seringkali digabung atau dilaksanakan bersamaan dengan posyandu lansia. Padahal pada awal pembinaan sudah ditetapkan bahwa kesejahterannya menjadi bagian pembinaan departemen sosial, kesehatannya bagian dari pembinaan kementerian kesehatan dan BKKBN ke arah menjaga keharmonisan agar orang tua tidak tersinggung, tidak sakit hati, sehingga bisa mempengaruhi kepada keretakan dan ketahanan lansia tersebut.

Selain itu, dalam aspek aplikasi program seharusnya implementator melaksanakan semua point yang terdapat dalam pedoman, tetapi ada satu point yang termuat dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 13 Tahun 2019 yang tidak dilaksanakan oleh implementator yaitu mengembangkan sistem informasi manajemen melalui berbagai media. Hal ini mengakibatkan program Bina Keluarga Lansia (BKL) kurang dikenal masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini

ialah proses implementasi sesuai model O'Jones (dalam Suprastiyo, 2019) terdiri dari 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Pelaksanaan. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 11 informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (Sugiyono dalam Suprastiyo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi Pelaksanan

Organisasi birokrasi merupakan unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur mempunyai tujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan antara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan organisasi. Penataan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi supaya wewenang, bagian-bagian, tidak dilewati oleh organisasi. Adanya aturan yang pasti akan dapat menghapus tugas-tugas pegawai yang tumpang tindih, serta dapat menghasilkan prosedur kerja yang baku.

Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana teknis tingkat kecamatan dan desa ditemukan masalah yang sama yaitu saat proses pembentukan sulit menentukan pengurus karena rata-rata orang yang aktif dan mau sudah menjadi pengurus di

lembaga lain. Hal ini juga berdampak pada tahapan pelaporan yakni terlambatnya kader di tingkat desa dalam membuat laporan rutin.

Pelaksana tingkat kabupaten dan kecamatan merasakan kendala yang sama yakni jumlah personil yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam segi jumlah terdapat masalah, disisi yang lain masih terdapat tumpang tindih dimana terdapat kader yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas karena mereka memiliki pekerjaan lain untuk dilakukan.

2. Interpretasi

Adanya pemahaman yang baik oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Jones dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mereka yang menerapkan keputusan ataupun kebijakan harus mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan. Kalau kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima namun juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan dan akhirnya mereka akan memiliki kebijakan tersendiri dalam memandang kebijakan.

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terkait interpretasi para pelaksana program berjalan dengan baik, mereka mengerti perannya masing-masing dan menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu terjalin komunikasi antara pelaksana program.

Kendala yang dialami PLKB kecamatan adalah dengan pihak mitra selaku yang mempunyai kewenangan anggaran kurang mengerti program tersebut. Problem yang dialami Kader BKL yaitu kurang

adanya komunikasi dengan anggota yang merupakan sasaran program, tetapi problem tersebut tidak terjadi terus menerus mungkin karena faktor lupa mengabarkan bahwa akan ada kegiatan.

3) Pelaksanaan

Dalam implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) telah diatur dalam Peraturan BKKBN Nomor 13 tahun 2019. Dalam Perka tersebut terdapat mekanisme kerja pelaksana atau pengelola program Bina Keluarga Lansia (BKL) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai pelaksana tingkat desa. Mekanisme kerja Bina Keluarga Lansia (BKL) terdiri dari 5 tahap, yakni: tahap persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Aplikasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro tahapannya telah dilaksanakan sesuai pedoman yaitu Perka BKKBN Nomor 13 tahun 2019 kecuali pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen melalui berbagai media belum diterapkan tetapi pelaksanaan akan mengupayakan, selain itu sejak adanya pandemi pelaksanaan program BKL tidak bisa maksimal. Pada tingkat provinsi, Kabupaten Bojonegoro urutan kedua dalam hal banyaknya pertemuan atau penyuluhan yang dilaksanakan, yaitu sejumlah 340 pertemuan. Masyarakat memberikan respon positif terhadap BKL karena merasa keluarganya diperhatikan dan menjadi paham bagaimana psikis lansia serta cara merawat lansia.

Kendala yang dijumpai yaitu pada tahap pelaporan, dalam pengerjaan laporan sering adanya keterlambatan karena pengurus poktan merangkap tugas atau disibukkan hal lain, serta ada juga kelompok yang tidak melapor karena vakum. Selain itu, dalam format pelaporan hanya diketahui kondisi BKL secara kuantitas, sedangkan

kuaitas BKL itu sendiri tidak nampak. Meskipun tidak semua poktan ter-monev semua secara langsung, para pelaksana mengupayakan tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi dibantu dengan teknologi atau meminta laporan kepada masing-masing PLKB pemegang wilayah.

Disimpulkan bahwa aplikasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro tahapannya sudah dijalankan sesuai pedoman, yaitu Perka BKKBN Nomor 13 tahun 2019 hanya satu point saja yang belum dilaksanakan. Tetapi tidak dapat dipastikan bagaimana kualitas BKL itu sendiri karena dalam pencatatan dan pelaporan hanya diketahui kuantitas BKL serta pelaksanaannya gabung dengan posyandu lansia. Hal ini bisa saja kegiatan yang dilaporkan adalah kegiatan posyandu lansia. Kemudian dalam tahapan monitoring dan evaluasi pelaksana kesulitan merelalisasikannya karena keterbatasan waktu dan personil.

SIMPULAN

1. Pada aspek organisasi, implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa sumber daya manusia pelaksana program sudah mumpuni, program dilaksanakan dengan baik, tetapi terbatasnya IT beberapa PKB/PLKB menjadi masalah dalam hal pelaporan. Dalam hal anggaran tidak ada masalah, untuk dinas sudah diatur pusat secara terperinci include dengan APBD, sedangkan anggaran untuk pelaksanaan di tingkat desa sudah include dengan dana APBDes. Dalam hal fasilitas penunjang pelaksanaan program kurang terpenuhi, BKL KIT (alat peraga) hanya ada 2 se-kabupaten, juga tidak adanya sekretariat.
2. Pada aspek interpretasi, Implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup

dipahami oleh para pelaksana program. Para pelaksana sudah paham betul bahwa implementasi program Bina Keluarga Lansia (BKL) bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Kendala yang dialami pelaksana tingkat kecamatan yaitu ketika menjumpai mitra yang kurang care dan tidak mengerti tentang program BKL. Disamping itu kendala yang dialami pelaksana tingkat desa adalah dengan internal, yaitu beberapa kali kurang komunikasi dengan anggota karena efek pandemi.

3. Pada aspek pelaksanaan, Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bojonegoro tahapannya sudah dijalankan sesuai pedoman, yakni Perka BKKBN Nomor 13 tahun 2019, hanya satu point saja yang belum dilaksanakan yaitu pengembangan sistem informasi manajemen melalui berbagai media, tetapi implementator sedang mengupayakan untuk mewujudkannya. Dalam hal kuantitas penyuluhan Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan dengan baik. Tetapi tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana kualitas BKL itu sendiri karena dalam pencatatan dan pelaporan hanya diketahui kuantitas BKL serta pelaksanaannya gabung dengan posyandu lansia. Kemudian dalam tahapan monitoring dan evaluasi pelaksana kesulitan merelalisasikannya karena keterbatasan waktu dan personil.

DAFTAR PUSTAKA

- Auldrin M Ponto dkk, Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan – Membangun Prasarana Fisik Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan

- Sumberdaya Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, Jakarta, 2021.
- BKKBN, Pedoman Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia, BKKBN, Jakarta, 2012.
- BKKBN, Panduan Center of Excellence (CoE) Kelompok BKL, BKKBN, Jakarta, 2017.
- BKKBN, Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia. BKKBN, Jakarta, 2012.
- Jamilah dkk, Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, 2016.
- Sari Seftiani, Penyelenggaraan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Wilayah Perkotaan: Potret Permasalahan Klasik. Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020.
- Suprastiyo, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 2 (2), 255-263.
- Suprastiyo, A. (2020). Quality Of Birth Certificate Management Services in the Department of Population and Civil Registration Bojonegoro District.